

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM *E-GOVERNMENT* DALAM PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Romy Ardian Fajrul Falah, Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP

Email: romyardian15@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penerapan *e-government* melalui aplikasi SiNOPa serta bagaimana agar *website* SiNOPa dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk implementasi *e-government* di Kabupaten Lamongan adalah melalui aplikasi Sistem Informasi Nomor Objek Pajak (SiNOPa), yang dirancang untuk mempermudah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) secara digital. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa *website* SiNOPa memiliki potensi signifikan dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital masyarakat, dan sinergi antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penerapan yang komprehensif, seperti memperluas dan memperkuat infrastruktur teknologi secara merata, meningkatkan kapasitas literasi digital melalui program edukasi yang terstruktur, serta mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah, penyedia layanan teknologi, dan masyarakat guna memastikan adopsi sistem yang lebih luas dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis penelitian mengindikasikan bahwa *website* SiNOPa dalam penerapan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan merupakan inisiatif strategis yang memerlukan penguatan melalui penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan strategi yang terarah, program ini berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Kata Kunci: E-Government, PBB-P2, Strategi Pelaksanaan

ABSTRACT

This study aims to analyse the strategy of implementing e-government through the SiNOPa application and how the SiNOPa website can improve administrative efficiency and taxpayer compliance. One form of e-government implementation in Lamongan Regency is through the Tax Object Number Information System (SiNOPa) application, which is designed to facilitate the digital payment of Land and Building Tax Rural Urban (PBB-P2). The results indicate that the SiNOPa website has significant potential to optimise PBB-P2 revenues, but its success is largely determined by the readiness of the technological infrastructure, the level of digital literacy of the community, and the synergy between stakeholders. Therefore, a comprehensive implementation strategy is needed, such as equitably expanding and strengthening the technological infrastructure, increasing digital literacy capacity through structured training programmes, and encouraging active collaboration between government, technology service providers and the community to ensure wider and sustainable adoption of the system. Based on the research analysis, it shows that the implementation of the SiNOPa website in the application of PBB-P2 in Lamongan Regency is a strategic initiative that needs to be strengthened by adapting to the dynamics of community needs. Through the implementation of a focused strategy, this programme has the potential to be an effective tool in increasing tax revenues and supporting the acceleration of regional development.

Keywords: *E-Government, PBB-P2, Implementation Strategy*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan yang matang, dan berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat maupun suatu bangsa. Sedangkan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk merealisasikan cita-cita bernegara. Dasar hukum dari penyelenggaraan pembangunan daerah merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan itu sendiri harus dipahami sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional mencerminkan komitmen untuk secara terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis

pajak daerah yang telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengelola dan mengatur PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Lamongan telah melaksanakan pengelolaan PBB-P2 ini sejak tanggal 1 Januari 2014.

Berubahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memberikan dampak yang signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Perubahan ini memberikan implikasi pada kewenangan pemungutan, sistem pembagian hasil, serta cara perhitungan pajak yang sebelumnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Sebelum adanya kebijakan ini, penerimaan dari PBB-P2 masih dibagi antara Pemerintah Pusat 10% dan Pemerintah Daerah 90%. Namun, setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009, seluruh penerimaan dari PBB-P2 sepenuhnya menjadi pendapatan daerah kabupaten/kota tanpa adanya bagian yang disetorkan ke Pemerintah Pusat. Hal ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, dimana daerah memiliki otonomi lebih dalam mengelola pendapatan pajak guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam merancang *website* SiNOPa yang ditujukan untuk memfasilitasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Program ini juga berfungsi sebagai aplikasi pengelolaan PBB-P2 yang berbasis teknologi informasi. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merupakan landasan bagi pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* adalah suatu bentuk pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Diharapkan bahwa pemberlakuan *e-government* dapat berdampak positif terhadap penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan.

Penerapan program *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam pembayaran pajak harusnya dapat memberikan perubahan budaya, yang mana resistensi terhadap perubahan dari metode konvensional ke digital baik di kalangan pegawai pemerintah maupun masyarakat. Perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam penggunaan *website* SiNOPa sebagai pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Sistem informasi yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Lamongan adalah Sistem Informasi Nomor Objek Pajak (SiNOPa). Sistem informasi ini adalah sistem pelayanan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang disediakan dalam situs *website* resmi Badan Pendapatan Daerah Lamongan. Sistem Informasi Nomor Objek Pajak (SiNOPa) adalah sebuah sistem yang menyajikan informasi PBB-P2 mengenai informasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang berisikan laporan besaran kena pajak atas PBB-P2.

Penerapan SiNOPa ini dapat memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh informasi mengenai PBB-P2 dengan cepat dan akurat. Wajib Pajak dalam pembayaran PBB-P2 tidak perlu menunggu SPPT diterbitkan untuk melakukan pembayaran dan tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan melainkan dapat di akses melalui Sistem Informasi Nomor Objek Pajak.

Kualitas pelayanan publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan adanya penerapan SiNOPa dapat dikatakan meningkat apabila sistem informasi ini berhasil digunakan dan dimanfaatkan dalam pelayanan perpajakan. Sebuah sistem informasi dikatakan sukses atau berhasil apabila kualitas sistem tersebut baik dan informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berkualitas serta didukung oleh pelayanan yang baik dari penyedia sistem informasi tersebut.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor penghambat penerapan *website* SiNOPa, menganalisis strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan dalam mengelola PBB-P2 melalui *website* SiNOPa sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

KERANGKA TEORITIS

1. Strategi Kebijakan

Menurut Mintzberg (1994), strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan rangkaian tindakan menjadi satu kesatuan.

2. E-Government

Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam *website*, *e-government* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif.

3. Pajak dan Kepatuhan Warga

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak adalah

suatu iuran dari warga negara terutang negara yang didasari Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat di tujukan serta digunakan sebagai pengeluaran umum negara. Sedangkan menurut Mitchell (1996) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian.

4. E-Government sebagai strategi peningkatan kepatuhan warga

Menurut Moon (2002) menjelaskan bahwa *e-government* dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga dengan menyediakan akses yang lebih mudah, cepat, dan transparan terhadap informasi dan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memperoleh gambaran secara nyata atau langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan cara pengamatan atau observasi, melakukan wawancara kepada narasumber atau informan di lokasi penelitian. Lokasi atau wilayah yang dipilih oleh penulis secara geografis berada di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Peneliti telah menetapkan subjek penelitian yakni Instansi terkait seperti Bapenda, Bappelitbangda, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa dan Masyarakat Wajib Pajak. Analisis data menggunakan metode yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dalam memvalidasi data peneliti menggunakan teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Mengelola PBB-P2 Melalui *Website* SiNOPa Sebagai Sumber PAD.

1) Perataan Terhadap Optimalisasi Sistem Informasi Pajak Daerah Dengan Menggunakan *Website* SiNOPa

Optimalisasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) ini menjadi strategi penting bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan PBB-P2 yang lebih efektif dan efisien. Melalui Aplikasi SiNOPa, Bapenda mampu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah, memberikan layanan yang mudah diakses masyarakat, serta mendukung edukasi yang berkelanjutan dalam memperkuat kemandirian keuangan kabupaten lamongan, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. SIPD dirancang sebagai platform yang mampu mengintegrasikan data terkait pajak daerah,

Dalam segi perataan ini Bapenda telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh baik melalui tatap muka dengan cara sosialisasi ke tingkat keterwakilan masyarakat melalui aparat pemerintah desa yang dilaksanakan di kecamatan. Selain itu, Bapenda juga melakukan sosialisasi secara online atau digital. Hal ini tentunya menjadi hal yang positif yang diperoleh masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 juga untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang dapat di akses melalui aplikasi Sistem Informasi Nomor Objek Pajak (SiNOPa).

2. Pemberian Reward dan Sanksi Pada Wajib Pajak

Penerapan sistem ini digunakan untuk meningkatkan kapatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2, serta sistem ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pemerataan bagi wajib pajak dengan memberikan intensif maupun disintensif dalam pembayaran PBB-P2. Adanya pemberian *reward* dan *sanksi* diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dengan membayar PBB-P2 sesuai dengan pengklasifikasian fungsi objek pajak yang dimiliki.

Sinergi antara *reward* dan *sanksi* memungkinkan pemerintah membangun sistem perpajakan yang adil. Wajib pajak yang taat akan merasa dihargai, sementara yang melanggar mendapatkan konsekuensi atas tindakannya. Oleh karena itu, baik *reward* dan *sanksi* saling melengkapi dan mendorong terbantuknya budaya kepatuhan yang kuat di masyarakat. Selain itu, kebijakan ini menciptakan kesadaran bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah.

3. Pembuatan Aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan melihat di era digital saat ini, penerapan teknologi informasi menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan pada sistem digital. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola data spasial yang terkait dengan objek pajak, seperti Lokasi tanah dan bangunan.

Pembuatan aplikasi SIG diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan pengelolaan PBB-P2, seperti pendataan yang kurang valid, keterlambatan pembayaran pajak, dan potensi kehilangan pendapatan akibat kesalahan administrasi. Melalui aplikasi SIG, Bapenda dapat mengintegrasikan data objek pajak secara real-time, mempermudah identifikasi dan pengawasan, serta memberikan akses informasi yang lebih transparan kepada masyarakat. Selain itu, aplikasi SIG juga mendukung implementasi program pemerintah menuju transformasi digital pelayanan publik.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Penerapan *Website* SiNOPa Sebagai Pembayaran PBB-P2 Secara Digital di Kabupaten Lamongan

1. Rendahnya Literasi Digital Pada Wajib Pajak

Literasi Digital juga merupakan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan informasi secara kognitif dan teknis. Selain itu perlunya juga literasi pajak, yang mana literasi pajak dideskripsikan sebagai proses untuk mengembangkan keterampilan dan mendapatkan kepercayaan diri untuk menyadari dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pajak, konsekuensi perpajakan akibat keputusan tersebut, mengetahui di mana memperoleh bantuan terkait masalah pajak, serta menggunakan pengetahuan dalam membuat pilihan dan keputusan berdasarkan informasi sehubungan dengan berbagai transaksi.

Rendahnya literasi digital juga berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya mempengaruhi potensi penerimaan daerah dari sektor PBB-P2. Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap rendahnya literasi digital di Kabupaten Lamongan yaitu antara lain aksesibilitas teknologi yang belum merata, kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang layanan digital, serta minimnya pendampingan bagi kelompok masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, seperti warga lansia dan masyarakat di wilayah perdesaan.

2. Kurangnya Pemerataan Pada Infrastruktur Teknologi

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan sistem pembayaran PBB-P2 secara digital adalah belum meratanya infrastruktur jaringan internet. Beberapa wilayah, terutama di daerah perdesaan atau terpencil, masih menghadapi keterbatasan akses internet yang memadai. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan *e-government*, baik dalam proses registrasi, pembayaran, maupun pelaporan. Kurangnya pemerataan pada infrastruktur internet tidak hanya memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan pajak elektronik, tetapi juga menurunkan efektivitas dan efisiensi dari sistem yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Kebutuhan industri untuk menggunakan internet sebagai layanan tambahan sangat membantu khususnya dalam pembayaran berbasis digital. Namun secara eksplisit, regulasi dan kebijakan pemerintah dinilai lamban dalam merespon dinamika perkembangan TIK dan kebutuhan masyarakat akan layanan digital. Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan, dan ketersediaan infrastruktur TIK.

C. Tingkat Sosialisasi *Website* SiNOPa Kepada Wajib Pajak

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung sosialisasi program PBB-P2 secara digital juga menjadikan tantangan yang signifikan. Banyak warga yang masih menganggap bahwa pajak hanya kewajiban administratif sehingga sedikit warga desa yang memahami dampaknya terhadap pembangunan daerah. Selain itu, faktor kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital juga mempengaruhi partisipasi mereka. Sebagian besar wajib pajak kurang aktif dalam melaporkan perubahan objek maupun subjek pajaknya sehingga data kepemilikan tidak update. Upaya yang dilakukan untuk masyarakat selaku wajib pajak dalam memahami pentingnya membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, melalui sosialisasi yang dilakukan beberapa kali dalam setahun melalui tingkat kelurahan atau kecamatan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Khairul Huda selaku Sekretaris Kecamatan Lamongan, dalam sistematika pensosialisasian aplikasi SiNOPa dalam penerapan pajak bumi dan bangunan, pemerintah kecamatan mengikuti arahan dari Bapenda Kabupaten Lamongan yang nantinya kemudian dari pemerintah kecamatan akan mengundang setiap kepala desa untuk hadir dalam satu forum untuk membahas program *e-government* tersebut.

kemudian dari kepala desa akan memberikan sosialisasi terhadap warga desa secara langsung melalui rapat rukun tangga (RT), namun disini lain kendala dalam sosialisasi seperti kurangnya partisipasi masyarakat sehingga ketika mengetahui adanya sosialisasi pajak warga desa enggan untuk datang.

2. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Dalam Sosialisasi

Sosialisasi aplikasi SiNOPa dalam penerapan pajak bumi dan bangunan membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit, mulai dari pelaksanaan kegiatan seperti mengadakan pertemuan warga, kemudian pembuatan materi untuk sosialisasi seperti leaflet dan video. Di Kabupaten Lamongan keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah daerah menjadi terbatas dalam menjangkau seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dengan akses internet yang minim.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ivan Arsad Ardyansa selaku informan dari Bapenda Kabupaten Lamongan menyebutkan dalam pemeliharaan aplikasi SiNOPa membutuhkan dana yang cukup banyak, mengingat fitur yang ada di dalamnya cukup banyak. Dalam keterbatasan-keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar kebijakan program *e-government* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, seperti sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial resmi pemerintah daerah, kemudian kerja sama antara perangkat desa dan tokoh masyarakat menjadi alternatif untuk menjangkau warga yang tinggal di pelosok perdesaan.

D. Refleksi Temuan Penelitian dan Kontribusi Akademik

Penelitian ini membahas strategi pelaksanaan *website* SiNOPa dalam penerapan pajak bumi dan bangunan di kabupaten lamongan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya strategi utama yang telah diterapkan pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu Perataan Terhadap Optimalisasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) Dengan Menggunakan Aplikasi SiNOPa yang mana salah satu inovasi yang muncul adalah penggunaan aplikasi SiNOPa (Sistem Informasi Nomor Objek Pajak) yang digunakan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan kinerja SIPD, Aplikasi SiNOPa juga dirancang untuk memberikan solusi pengelolaan pajak daerah, notifikasi pembayaran dan dengan memanfaatkan teknologi digital yang lebih baik, SiNOPa juga diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam pelaksanaan SIPD.

Temuan penelitian dari wawancara peneliti menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Lamongan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan *website* SiNOPa untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan sosialisasi. Pemerintah Kecamatan diberi mandat untuk mensosialisasikan aplikasi SiNOPa tersebut kepada para kepala desa di lingkup kecamatannya masing-masing. Langkah ini bertujuan untuk memastikan informasi mengenai sistem pembayaran digital tersampaikan secara menyeluruh hingga ke tingkat desa, sehingga dapat meningkatkan

pemahaman dan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan kepala desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah, diharapkan aplikasi SiNOPa ini dapat diterima secara efektif,

Mal Pelayanan Publik sendiri menjadi tempat strategis untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mengingat keberadaannya sebagai pusat layanan terpadu yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk keperluan administratif lainnya. Kehadiran Bapenda di MPP juga menciptakan peluang untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang masih belum terlalu paham dengan teknologi digital atau yang memerlukan bantuan teknis dalam menggunakan sistem pembayaran online.

KESIMPULAN

Penerapan *website* SiNOPa, masih menghadapi tantangan yang perlu segera diatasi agar dapat berfungsi secara optimal. Beberapa hambatan meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah pedesaan dengan akses internet yang terbatas, rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan rendahnya tingkat adopsi terhadap sistem ini, Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta cara penggunaan SiNOPa juga menjadi kendala dalam meningkatkan jumlah pengguna aktif. *Website* SiNOPa memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam modernisasi sistem perpajakan daerah di Kabupaten Lamongan. Dengan adanya sistem digital ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses informasi pajak, melakukan pembayaran secara daring, serta mengurangi ketergantungan pada sistem manual yang lebih rentan terhadap

kesalahan dan keterlambatan.

SARAN

Berdasarkan penarikan kesimpulan di atas, penulis melihat perlu adanya masukan serta saran terkait strategi pelaksanaan program *e-government* dalam penerapan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan juga perlu meningkatkan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi yang komprehensif, baik melalui perangkat desa, maupun media komunikasi yang mudah dijangkau masyarakat. Dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, dan kebijakan yang lebih inklusif, strategi pelaksanaan program *e-government* di Kabupaten Lamongan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas.

Hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah pemerataan infrastruktur dan akses teknologi yang menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan pajak bumi dan bangunan secara digital adalah keterbatasan akses internet dan sinyal di wilayah pedesaan. Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu berkoordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan internet, terutama di desa-desa yang masuk kategori terpencil. Perlunya sosialisasi yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui Bapenda Lamongan, untuk memastikan bahwa sosialisasi mengenai *e-*

government dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat desa, sebagai contohnya mengadakan pelatihan khusus yang melibatkan perangkat desa untuk memberikan pelatihan kepada warga desa tentang tata cara menggunakan aplikasi SiNOPa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, E. (2015). *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Basis AkruaI Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Afifa Nur Rosidah, A. N. R. (2021). *Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran (PBB P-2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan).
- Andini, E. W. (2018). *Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Elektronik Sebagai Perwujudan Program Reformasi Administrasi Perpajakan*. Skripsi Universitas Brawijaya Malang.
- Cahaya, M. (2023). *Penerapan Aplikasi GIS Pemetaan Lokasi Rawan Kriminalitas Daerah Kabupaten Lamongan Berbasis Website* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Lamongan).
- Deddy Priyatna, D. P. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2*

- Kabupaten Lamongan (Studi pada Bapenda Kab. Lamongan)*. Diss. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
- Fikri Nur Rachman, F. N. R. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Lamongan* (Studi pada KPP Pratama Kab. Lamongan) (Doctoral dissertation, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan).
- Hapsari, M. T., Domai, T., & Hidayati, F. (2018). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19 (01), 2018, 21-30 *Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(01), 21-30.
- Husnia, Fitria Nur, Kadarisman Hidayat, and Rizki Yudhi Dewantara. (2016). *Analisis penerapan elektronik pajak bumi dan bangunan (E-PBB) (studi pada dinas pendapatan daerah kabupaten Lamongan)*. Diss. Brawijaya University.
- Mardiasmo, P., & Yogyakarta, A. (2016). *Article References Download Details Statistics*.
- Mayasari, J. (2017). *Analisis Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan (PBB P2) (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Mochamad, D. A. (2022). *Pengembangan E-PBB Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Wonosobo)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Muhtarom, Abid. "*Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015.*" *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)* 2.1 (2017): 15-Halaman.
- Nurlaili Yatul Maulidiyah, N. Y. M. (2021). *Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020)* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan).
- Nopyandri. "*Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*" *JPIH (Jurnal Penelitian Ilmu Hukum)* Volume 5 Tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Pratiwi, D., Nataliawati, R., Dewi, A., & Haskim, M. B. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan*. *Media komunikasi ilmu ekonomi*, 38(2), 14-21.